RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

AKD: RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Bulan: Agustus 2020

Oleh: RUU TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

KOMISI X DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) dengan para pakar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri mengatakan, RUU SKN dibuat untuk merevisi UU SKN yang masih berlaku. Fikri mengungkapkan, pembahsan kali ini, yaitu mengenai bagaimana hukum postif bisa berdampingan dengan regulasi olahraga internasional yang selama ini tidak bisa diintervensi. “Negara hanya memberi dukungan sarana, prasarana, dan infrastruktur olahraga, serta bantuan pendanaan. Sementara pasal-pasal tentang akreditasi, standardisasi, sertifikasi, arbitrase, doping, dan penyelesaian sengketa olahraga, sudah pula diatur dalam regulasi olahraga internasional,” ungkap Fikri saat dikonfirmasi. Fikri menyatakan, lewat Panja RUU SKN, Komisi X ingin memperjelas posisi negara atau pemerintah dengan lembaga Lex Sportiva Instituta yang mengatur dunia olahraga internasional. Apalagi, setiap cabang olahraga internasional punya regulasinya sendiri yang tidak boleh diintervensi oleh negara atau pemerintahan yang sedang berkuasa. Baca juga : Aturan Digitalisasi TV Segera Rampung dalam RUU Cipta Kerja “Inti diskusi pada rapat dengar pendapat umum ini adalah sejauh mana doktrin lex sportiva ini dapat diterapkan dalam sistem keolahragaan nasional yang akan kita revisi ke depan. Bagaimana pula kedudukan negara dengan statuta federasi olaharaga internasional,” kata Fikri. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, Pemerintah sebagai representasi negara berkepentingan untuk menegakkan hukum atau regulasi di wilayahnya termasuk regulasi sektor olahraga. Namun, ada benturan kepentingan dengan regulasi olahraga internasional. “Dalam rapat ini perlu penjelasan soal kedudukan negara termasuk kedudulan regulasi negara terhadap regulasi dunia olahraga yang mengacu pada statuta federasi masing-masing cabang olahraga. Bagaimana organisasi cabang olehraga sebagai organisasi non-pemerintahan harus patuh pada statuta federasi di satu sisi, namun harus tunduk pula pada hukum positif negara," papar legislator dapil Jawa Tengah IX ini. Pembahasan mengenai lex sportiva instituta, sambung Fikri, di awal kerja Panja RUU SKN ini sangat penting. Jika doktrin lex sportiva ini masuk dalam konsideran menimbang RUU SKN, maka sangat mungkin UU SKN lebih sederhana daripada UU yang berlaku sekarang. “RUU ini terdiri dari 20 bab dan 29 pasal. Bisa jadi pasal-pasal tentang kewenangan dan kewajiban Pemerintah terhadap olahraga khususnya olahraga prestasi akan berkurang,” pungkasnya. (OL-2)

Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/326486-ruu-sistem-keolahragaan-nasional-mulai-dibahas-komisi-x

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	50 RUU Masuk Prolegnas 2020, Berikut Daftarnya	https://mediaindonesia.com/rea \nd/detail/283848-50-ruu-masuk-p \nrolegnas-2020-berikut-daftarny \na
Berita	Di Masa Tua Atlet Harus Diperhatikan	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39496
Berita	Diperlukan sosok profesional di PT Liga	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39162
Berita	DPD Minta Pengurangan 10 Cabor PON Dikaji	https://mediaindonesia.com/rea \nd/detail/283393-dpd-minta-peng \nurangan-10-cabor-pon-dikaji
Berita	Dualisme Kepengurusan Perkemi harus segera Diselesaikan	https://mediaindonesia.com/rea \nd/detail/249154-dualisme-kepen \ngurusan-perkemi-harus-segera-d \niselesaikan
Berita	Kemenpora Maksimalkan UU Sistem Keolahragaan Nasional	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/36879
Berita	Komisi X dorong olahraga dapat bantuan dana CSR	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39776
Berita	Pacu prestasi atlet, Revisi UU No 3/2015	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/34488
Berita	Persiapan PON dan Peparnas 2020 berlanjut	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/39115
Berita	Senayan: Bangun Sistem yang Baik	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/34802
Berita	Stagnasi Anggaran Kemenpora Bukan Masalah	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/37265
Berita	Suara DPR, Utut Adianto: Silakan buat rekomendasi ubah UU SKN	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/4691
Berita	Susun RUU, DPR Mau Beri Kepastian Bonus Bagi Atlet Berprestasi	http://kliping.dpr.go.id/index \n/detail/id/35010
Buku	Interaksi Antara Proses Menua Olahraga dan Kesehatan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=170 \n79
Buku	Olahraga dan Kesehatan	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=170 \n65
Buku	Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem keolahragaan nasional	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=192 \n42
Buku	Sholat Olahraga Ampuh untuk Diabetes Melitus	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=298 \n57
Buku	Strategi Olahraga Nasional Abad Ke-21	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=307 \n99
Buku	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=189 \n53
Dokumen	Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keolahragaan	https://www.dpr.go.id/dokakd/d \nokumen/BALEG-RJ-20210406-02094 \n0-5459.pdf
Undang-undang & Peraturan	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun … Tentang Keolahragaan	https://www.dpr.go.id/dokakd/d \nokumen/Paripurna-RJ-20220310-0 \n93013-5640.pdf